

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana implementasi *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) berperan dalam memfasilitasi investasi Singapura ke Vietnam pada sektor manufaktur berteknologi tinggi periode 2019–2024. Berdasarkan hasil analisis struktural-institusional, empiris, dan deskriptif, dapat disimpulkan bahwa CPTPP berperan sebagai Kerangka Institusional yakni kerangka kerja yang memungkinkan dan mempercepat bukan determinan tunggal perubahan kualitas, skala, dan arah investasi Singapura di Vietnam, dari pola investasi berbasis infrastruktur dan manufaktur padat karya menuju investasi berorientasi teknologi tinggi, rantai nilai global, dan industri hijau. Secara struktural, kerangka hukum Chapter 9 CPTPP, yang mencakup prinsip *national treatment, fair and equitable treatment*, perlindungan dari ekspropriasi, dan mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS), menjadikan CPTPP sebagai kerangka institusi bagi transformasi Vietnam menuju basis manufaktur berteknologi tinggi di kawasan Asia-Pasifik.

Nilai FDI Singapura ke Vietnam meningkat dari USD 4,50 miliar (2019) menjadi USD 10,21 miliar (2024), atau tumbuh 126,9 persen, dengan Singapura mempertahankan posisinya sebagai investor terbesar di Vietnam secara konsisten sejak 2020 hingga 2024. Peningkatan ini didorong oleh tiga jalur transmisi, yaitu penurunan biaya masuk pasar melalui penghapusan tarif, peningkatan kepastian regulasi, serta integrasi yang lebih dalam ke *global value chains*. Pada level mikro, hal ini tercermin pada strategi tiga perusahaan Singapura, yaitu Sembcorp Development melalui Vietnam-Singapore Industrial Park (VSIP) yang memperluas portofolio menjadi 18 kawasan industri pada akhir 2024 dengan total investasi tenant USD 23,4 miliar, Mapletree Investments yang mengakuisisi aset logistik secara penuh tanpa kewajiban kemitraan lokal, serta Ascendas yang mengembangkan ekosistem taman teknologi setelah liberalisasi kepemilikan asing penuh di sektor data center. Ketiganya bersama-sama membentuk *full-stack Singapore industrial infrastructure* di Vietnam.

Akumulasi investasi tersebut tercermin pada peningkatan kontribusi sektor

Fathur Rahman, 2026

ANALISIS PERAN COMPREHENSIVE AND PROGRESSIVE AGREEMENT FOR TRANS PACIFIC PARTNERSHIP TERHADAP FOREIGN DIRECT INVESTMENT SINGAPURA DI SEKTOR TEKNOLOGI MANUFAKTUR VIETNAM
2019-2024

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

manufaktur berteknologi tinggi dari sekitar 40–41 persen (2018) menjadi lebih dari 55 persen (2023–2024), meskipun keberlanjutannya masih dihadapkan pada tantangan struktural domestik, khususnya kesenjangan keterampilan tenaga kerja di bidang teknologi tinggi, tingginya biaya logistik yang diperkirakan mencapai sekitar 20 persen dari PDB, birokrasi perizinan investasi yang belum sepenuhnya konsisten antarprovinsi, dan lemahnya penegakan hak kekayaan intelektual. Secara teoretis, temuan ini menegaskan relevansi kerangka Neoliberal Institusionalisme yang menekankan bahwa rezim institusional internasional seperti CPTPP mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan antar aktor, serta sejalan dengan teori FDI Krugman yang menjelaskan keputusan investasi sebagai hasil interaksi keunggulan kepemilikan, lokasi, dan internalisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa CPTPP, khususnya melalui Chapter 9, berfungsi sebagai variabel kunci yang menjembatani potensi ekonomi Vietnam dengan realisasi investasi Singapura yang berkualitas lebih tinggi, namun efektivitasnya tetap bergantung pada faktor struktural domestik Vietnam, yaitu kesiapan infrastruktur logistik, kualitas sumber daya manusia, tata kelola birokrasi perizinan, dan penegakan regulasi investasi, sebagai prasyarat bagi optimalisasi manfaat CPTPP secara berkelanjutan.

VI.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, penulis merumuskan sejumlah saran yang ditujukan kepada pemangku kepentingan terkait, baik dari sisi kebijakan maupun pengembangan akademik, guna mendorong optimalisasi peran CPTPP dalam memperkuat investasi Singapura di sektor manufaktur berteknologi tinggi Vietnam secara berkelanjutan.

VI.2.1 Saran Praktis

Pertama, pemerintah Vietnam disarankan memperkuat implementasi regulasi perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) sesuai standar Chapter 18 CPTPP, mengingat lemahnya penegakan HKI masih menjadi hambatan utama bagi investasi teknologi tinggi dari Singapura. Kedua, pemerintah kedua negara perlu meningkatkan kerja sama pengembangan sumber daya manusia, terutama di bidang semikonduktor, kecerdasan buatan, dan otomasi industri, guna

menutup kesenjangan keterampilan (skills gap). Ketiga, pemerintah Vietnam disarankan memperkuat konsistensi implementasi kebijakan investasi antardaerah agar investor asing tidak menghadapi inkonsistensi birokrasi antarprovinsi. Keempat, pelaku usaha Singapura disarankan memanfaatkan secara optimal klausul Chapter 9 CPTPP, khususnya mekanisme ISDS, sebagai instrumen perlindungan atas aset dan kekayaan intelektual yang ditanamkan di Vietnam. Kelima, pemerintah Vietnam disarankan mempercepat pembangunan infrastruktur logistik dan konektivitas kawasan industri, mengingat tingginya biaya logistik domestik masih menjadi salah satu faktor struktural yang membebani daya saing investasi berteknologi tinggi.

VI.2.2 Saran Akademis

Dari sisi pengembangan ilmu Hubungan Internasional, penelitian ini menyarankan beberapa arah pengembangan teoritis. Pertama, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan Neoliberalisme Institusional dengan kerangka teori Global Value Chains (GVC) dan Economic Geography untuk menganalisis dampak CPTPP terhadap pola spesialisasi produksi dan distribusi investasi di kawasan Asia-Pasifik secara lebih komprehensif. Kedua, penelitian lanjutan disarankan memperluas cakupan komparatif pada pasangan negara anggota lain, seperti Jepang-Vietnam atau Australia-Malaysia, guna memperoleh generalisasi teoritis yang lebih kuat. Ketiga, peneliti berikutnya disarankan menggunakan pendekatan mixed-methods, misalnya gravity model atau difference-in-differences estimation, untuk mengukur secara lebih presisi kontribusi kausal CPTPP terhadap arus FDI. Keempat, penelitian mendatang dapat mengeksplorasi dimensi kepatuhan (compliance) Vietnam terhadap kewajiban CPTPP dari perspektif teori kepatuhan internasional, guna memahami sejauh mana reformasi domestik yang didorong CPTPP bersifat substantif atau sekadar prosedural.